

MODEL BIROKRASI PARKINSON DALAM PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY)

Fajar Kuala Nugraha*

Abstract

This paper explains about huge bureaucracy phenomenon in SBY government era. The huge bureaucracy can be understood as an ineffective government. SBY policy with huge bureaucracy is a form of his political choice in purpose to accommodate his supporters. Parkinson model is usually used in U.S government system. Because of that, when SBY adopted huge bureaucracy model, many critics was pointed to him. Why? Because it is not suitable with spirit of thin structure and rich function.

Key word: *bureaucracy, ineffective, huge*

Abstrak

Makalah ini berkisah mengenai gejala birokrasi yang gemuk pada pemerintahan SBY. Birokrasi yang tambun atau gemuk bisa ditafsir sebagai pemerintahan yang tidak efisien. Kebijakan SBY yang membuat birokrasi tambun merupakan bentuk dari pilihan politiknya dalam rangka mengakomodir orang-orang yang pernah berjasa kepada dirinya. Model Parkinson ini biasanya digunakan dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat. Karena itu, ketika SBY mengambil model birokrasi yang tambun, maka kritik pun dialamatkan kepadanya. Mengapa? Karena dinilai tidak sejalan dengan semangat miskin struktur, kaya fungsi.

Kata kunci: *birokrasi, tidak efisien, dan tambun*

* Peneliti pada Indonesia Indikator-Jakarta

Pengantar

“Birokrasi adalah “jantung” negara. Sehatnya sebuah birokrasi, sehat dan amanlah suatu negara. Dan busuknya birokrasi, mengakibatkan busuknya negara. Tentu saja, busuknya negara akan membusukkan masyarakat”⁷⁷

Birokrasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Mengurus KTP ke kelurahan, mengurus surat akte kelahiran merupakan beberapa contoh hal kecil yang memperlihatkan bahwa birokrasi sudah menjadi kebutuhan pokok yang selalu dilakukan oleh masyarakat. Pada awal kemunculannya birokrasi dicituskan oleh seorang fisiokrat dan pemikir ekonomi politik Vincent de Gourney pada tahun 1745. Dalam pandangannya Vincent de Gourney mengartikan birokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh para pejabat dan kekuasaan yang terlalu besar yang berada di tangan para pejabat.⁷⁸

Semakin banyaknya urusan masyarakat yang memerlukan adanya birokrasi maka semakin banyak pula lembaga birokrasi yang bermunculan. Baik itu yang diciptakan oleh pemerintah maupun yang diciptakan oleh swasta. Munculnya berbagai macam lembaga birokrasi baru ini, tidak semuanya memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik yang didapatkan oleh masyarakat. Karena sebagian besar lembaga birokrasi baru ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan di antara setiap lembaga.

Munculnya lembaga-lembaga baru ini juga terjadi sampai ke ranah pusat di mana pada saat *reshuffle* kabinet, dilakukan juga pengangkatan 13 orang wakil menteri yang menyebabkan penggemukan daya sedot anggaran. Selain pengangkatan wakil menteri masih ada lagi beberapa lembaga baru yang diciptakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang dianggap aneh oleh sebagian besar masyarakat dan tidak jelas peruntukannya.

Merujuk pada terminologi “parkinsonisasi” yang dikemukakan oleh Hans-Dieter Ever dan Tilmen Schiel (1990) tulisan ini berusaha untuk melihat implikasi yang ditimbulkan dari adanya penambahan lembaga-lembaga atau individu birokrasi baru yang menyebabkan birokrasi menjadi tambun. Selain itu juga apakah dengan

⁷⁷ Dalam catatan sampul buku Jaring Birokrasi

⁷⁸ Halevy, Eva Etzioni. 2011. *Birokrasi & Demokrasi, Sebuah Dilema Politik*. Total Media, Yogyakarta. Hlm. 13

tambunnya struktur birokrasi saat ini akan melahirkan efektifitas kinerja seperti yang diharapkan oleh para elite pembuat kebijakan.

Sindrome Parkinson dan Struktur Birokrasi

Tambunnya birokrasi saat ini sering dikaitkan dengan suatu terminologi yang dikemukakan oleh dua orang ahli yakni Hans-Dieter Ever dan Tilmen Schiel yakni “parkinsonisasi”. Terminologi “parkinsonisasi” digunakan untuk menggambarkan kecenderungan buruk birokrasi mempertambun diri dengan tujuan politik. Hasil akhirnya adalah birokrasi yang kian menjauhi praktik kerja profesional, efisiensi, dan melayani.⁷⁹ Upaya mempertambun birokrasi ini dilakukan dengan menambahkan struktur baru dalam organisasi publik.

Parkinson menggambarkan adanya kecenderungan umum yang terjadi dalam suatu organisasi atau birokrasi. Salah satu hal pokok yang menjadi sorotan adalah adanya kegiatan yang memperbanyak jumlah orang yang terlibat di dalam birokrasi, hal ini dilakukan bukan lantaran kebutuhan fungsional dari birokrasi tersebut, melainkan adanya keinginan untuk melipat gandakan jumlah bawahan.

Selain itu dalam melihat fenomena parkinson atau tambunnya birokrasi yang kita miliki sekarang tidak terlepas dari struktur birokrasi yang dianut saat ini. Mengapa struktur ini menjadi salah satu acuan dalam melihat tambunnya birokrasi, karena strukturalisme berusaha menemukan *agenda-agenda* yang tersembunyi, aturan-aturan permainan yang menentukan aksi.⁸⁰

Birokrasi tradisional masih menjadi suatu bentuk organisasi birokrasi yang masih dipertahankan oleh negara kita hingga saat ini, di mana terdapat struktur yang berjenjang yang pada masing-masing strata tingkat jabatan dijabat oleh seorang pejabat struktural. Semakin tinggi jabatan struktural seseorang, akan semakin tinggi pula kewenangan dan makin besar pula fasilitas dan penghasilan yang dapat diperoleh.⁸¹ Pola kepejabatan struktural seperti ini akan menciptakan suatu ketidakadilan di mana pemberian gaji atau penghargaan diberikan secara tidak fair. Walaupun kinerja seorang

⁷⁹ Dalam artikel “Kabinet Parkinson” yang diunggah melalui laman web <http://nasional.kompas.com>

⁸⁰ Apter, David E. 1985. *Pengantar Analisa Politik*. LP3ES, Jakarta. Hlm. 371

⁸¹ Setiono, Budi. 2002. *Jaring Birokrasi Tinjauan Dari Aspek Politik Dan Administrasi*. PT. Gugus Press, Bekasi. Hlm. 164

staff dianggap bagus, tapi dia tidak akan mungkin memperoleh melebihi yang dimiliki oleh kepala bagian.

Struktur yang terdapat di dalam birokrasi juga dapat menimbulkan budaya primodialisme. Hal ini dikarenakan gap yang sangat jauh antara atasan dan bawahan, sehingga bawahan menjadi tergantung atau seperti memberikan penghormatan yang berlebihan, struktur di dalam birokrasi juga akan menimbulkan eksploitasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. Kreatifitas yang hendak dikembangkan oleh para bawahan juga tidak akan berpengaruh banyak karena mereka tidak dapat melangkahi para atasannya.

Menjamurnya Lembaga Birokrasi Baru

18 Oktober pemerintahan SBY mengumumkan *reshuffle* kabinet dengan urgensi yang dianggap tidak jelas oleh kebanyakan masyarakat. Yang menjadi perhatian utama adalah selain adanya *reshuffle* kabinet presiden juga mengangkat delapan orang wakil menteri. Sehingga pada Kabinet Indonesia Jilid II terdapat 34 orang menteri, tujuh pejabat setingkat menteri, dan delapan wakil menteri menjadikannya lebih “tambun” dibanding dengan kabinet sebelumnya yang terdiri atas 34 orang menteri, tujuh pejabat setingkat menteri, dan seorang wakil menteri.⁸² Dengan niat awal sebagai perbaikan dalam hal perekrutan di awal kabinet, malah menciptakan birokrasi yang tambun sehingga jelaslah kekeliruan menghasilkan kekeliruan baru.

Munculnya kabinet tambun ini dianggap aneh karena adanya usulan untuk melakukan perampingan kabinet yang dikemukakan setelah Pemilu Presiden 2009 silam. Sehingga dapat disimpulkan, dengan semakin tambunnya kabinet saat ini mencerminkan bahwa pemerintah gagal untuk menciptakan manajemen efektifitas. Selain itu munculnya kabinet tambun ini juga merupakan implikasi adanya akomodasi politik yang dilakukan oleh Presiden SBY untuk menjaga keutuhan koalisi antara partai-partai pendukung pemerintah.

Tidak hanya pengangkatan wakil menteri yang dapat dijadikan sebagai indikator adanya Sindrom Parkinson dalam birokrasi pemerintah kita saat ini, hal lain yang bisa dijadikan patokan adalah banyaknya lembaga baru bentukan presiden yang tidak jelas

⁸² Dalam artikel “Kabinet Parkinson” yang diunggah melalui laman web <http://nasional.kompas.com>

peruntukannya. Satuan Tugas (Satgas)⁸³ merupakan salah satu lembaga baru yang sering dibentuk presiden, tercatat sejak tahun 2005 sudah dibentuk tidak kurang dari 13 Satgas yang muncul hanya sesaat kemudian hilang seiring berjalannya waktu. Mulai dari Satgas Investasi Infrastruktur hingga yang terbaru adalah Satgas Anti Pornografi yang dipimpin oleh Menko Kesra Agung Laksono. Di bawah ini akan disajikan beberapa daftar Satgas bentukan Presiden.

Terlalu seringnya pemerintah membentuk sebuah lembaga baru birokrasi berupa Satgas mencerminkan bahwa skema reformasi birokrasi yang beberapa waktu ini didengungkan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan harapan. Komponen-komponen kelembagaan yang kita miliki tidak menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga memunculkan cara penanganan masalah yang cenderung bersifat reaksional. Hal ini menunjukkan Presiden Yudoyono tidak memiliki paradigma dan pendekatan komprehensif dalam mengatasi masalah dan cenderung tambal sulam.⁸⁴

Tabel 10⁸⁵ Satuan Tugas Bentukan Presiden

No.	Nama Satgas	Tahun Dibentuk	Tujuan Pembentukan
1.	Satgas Investasi Infrastruktur	Januari 2005	Pengembangan infrastruktur
2.	Satgas Reformasi Birokrasi	Agustus 2005	Pengawasan pelaksanaan negara oleh aparaturnegara yang dimulai dari system perekrutan hingga remunerasi
3.	Satgas Penanggulangan Konflik Poso	November 2005	Kerjasama antar lembaga dalam menangani konflik Poso
4.	Satgas Flu Burung	Februari 2007	Mengendalikan virus Flu Burung

⁸³ Dalam teori organisasi pembentukan satuan tugas (*task force*) merupakan satu dari enam alat yang dapat digunakan sebagai penghubung horizontal. Satgas terhitung merupakan alat untuk melakukan hubungan horizontal dengan kapasitas yang lebih tinggi dan juga tingkat kebutuhan akan koordinasi yang juga tinggi. Satgas digunakan apabila ditemukan sebuah hubungan horizontal yang kompleks untuk menghubungkan lebih dari dua bagian sekaligus. Satgas juga bersifat sementara, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah horizontal antarbagian yang dapat mengurangi beban koordinasi vertical. Satgas ini segera dibubarkan setelah permasalahan terselesaikan (Pengantar Teori Organisasi 2009).

⁸⁴ Dalam artikel Kompas edisi 3 Mei 2012 yang berjudul “Satgas dan Kerapuhan Pelembagaan”

⁸⁵ Datar Satgas bentukan Presiden ini didapatkan dari berbagai sumber mulai dari <http://www.mediaindonesia.com>, <http://majalah.tempointeraktif.com>, dan artikel berjudul “Satgas Satgas Bentukan SBY” yang diunggah melalui laman web <http://antikorupsijateng.wordpress.com>

5.	Satgas Anti Mafia Hukum	November 2009	Mengatasi praktik mafia hukum
6.	Satgas Pembentukan Kelembagaan REED	Persiapan September 2010	Menurunkan emisi disektor kehutanan dan lahan gambut, sesuai perijinan dengan Norwegia
7.	Satgas TKI	Juni 2011	Penanganan dan pembelaan khusus WNI yang terancam hukuman
8.	Satgas Pornografi	Anti Maret 2012	Pencegahan dan penanganan pornografi

Sumber: *diolah dari berbagai sumber*

Lambaga-lembaga birokrasi non struktural seperti Satgas yang terbentuk sekarang ini dinilai merupakan suatu pendekatan yang tidak tepat diterapkan untuk mengatasi berbagai persoalan. Karena sebagian besar orang yang duduk di dalam Satgas tersebut merupakan orang yang bisa dibilang memiliki kedekatan dengan presiden. Hal ini juga dapat dilihat dari pernyataan Uchok Sky Khadafi yang merupakan Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran yang dimuat dalam Koran Kompas edisi 3 Mei 2012: *“Dengan keberadaan orang tersebut, presiden bisa sembunyi dari persoalan masalah yang muncul itu.”*

Dilihat dari penataan aspek organisasi yang dijalankan era pemerintahan SBY , Sindrome Parkinson atau birokrasi tambun memang julukan tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut. Bagaimana tidak, belum selesai dengan lembaga satu muncul lembaga lain, belum lagi sejak memulai memerintah, SBY banyak dibantu oleh para staffnya , selain itu juga unit kerja hingga dewan pertimbangan preseden (Watimpres). Kemunculan ini juga didasarkan bukan sekedar karena suatu kebutuhan melainkan adanya “sesuatu” dalam pemerintahan kita.

Implikasi Yang Ditimbulkan

Dengan munculnya suatu terminologi Sindrome Parkinson birokrasi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dapat dipastikan bahwa birokrasi akan menjadi terlampau tambun. Birokrasi yang tambun ini akan semakin membebani masyarakat, dan akan memberikan celah baru bagi para birokrat untuk melakukan

korupsi. Selain hal tersebut ada beberapa implikasi yang dihasilkan dari tambunnya birokrasi saat ini.

Pertama, tambunnya birokrasi saat ini menyebabkan membengkaknya Anggaran dan Belanja Negara pada sektor belanja pegawai. Tingginya jumlah pegawai birokrasi kita saat ini menyebabkan keuangan yang dikelola pemerintah menjadi tidak sehat. Bayangkan saja belanja pegawai saat ini mencapai angka lebih dari 1500 Triliun, atau dengan kata lain anggaran belanja pegawai Rp. 212 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu dengan semakin banyaknya lembaga baru bentukan presiden secara otomatis memerlukan anggaran untuk melakukan berbagai kegiatan.

Dengan besarnya angka tersebut jelas terlihat bahwa pemerintah gagal melakukan perampingan birokrasi, apalagi pada tingkat pusat. Padahal birokrasi yang terdapat pada tingkat pusat hanya memiliki porsi tugas dan fungsi yang tidak terlalu besar yakni hanya membuat kebijakan. Lain halnya dengan para birokrat kelas bawah atau *street level bureaucracy*⁸⁶ yang selalu berhadapan dengan masyarakat.

Besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendanai belanja pegawai tersebut tidak menjamin bahwa orang yang duduk di dalam birokrasi merupakan orang yang memiliki kompetensi, karena selama ini kita semua tahu bahwa perbandingan tenaga fungsional tertentu dengan tenaga fungsional umum belum tentu pas. Untuk mengetahui secara jelas proporsi pengeluaran pemerintah dalam belanja birokrasi, berikut ini di bawah akan disajikan datanya:

Tabel 11⁸⁷ **Belanja Pegawai Pemerintahan SBY Tahun 2007-2012**

Jenis Pengeluaran	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belanja pegawai	90,425	112,830	127,670	148,078	182,875	215,725
Gaji dan tunjangan	50,343	67,761	70,654	80,990	89,737	104,936
Honorarium dan vakasi	11,532	7,766	8,496	14,334	31,025	41,615
Kontribusi sosial	28,550	37,303	48,520	52,754	62,113	69,174

Sumber: *Badan Pusat Statistik*

⁸⁶ Menurut Lipsky *Street Level Bureaucracy* adalah sebuah istilah yang merujuk pada pegawai pelayanan publik yang terlibat secara langsung dengan warga Negara dalam pekerjaannya dan memiliki keleluasaan secara substansi untuk mengeksekusi kebijakan.

⁸⁷ Diunggah melalui laman web <http://www.bps.go.id>

Kedua, tambunnya birokrasi pemerintah saat ini menyebabkan tugas dan fungsi kementerian antara lembaga menjadi tumpang tindih.⁸⁸ Tumpang tindihnya tugas dan fungsi birokrasi ini menyebabkan banyak pegawai birokrasi tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Karena ada beberapa lembaga yang terkesan kekurangan sumberdaya manusia dan lembaga lain terkesan kelebihan sumberdaya manusia.

Salah satu contoh yang dapat digunakan untuk menjelaskan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi kementerian atau lembaga negara ini adalah ketika presiden membentuk Satgas Anti Mafia Hukum. Satuan tugas ini dibentuk dengan harapan mampu mengatasi masalah praktik mafia hukum yang merugikan dalam hal penegakan keadilan, padahal pemerintah sudah memiliki institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, KPK, dan Kehakiman yang jelas-jelas memiliki tugas dan fungsi yang sama. Sehingga dapat terlihat dengan terbentuknya Satgas ini menimbulkan tumpang tindih fungsi lembaga tersebut dan membiaskan tugas masing-masing lembaga tersebut.

Ketiga, Sindrome Parkinson yang menyebabkan birokrasi menjadi tambun dapat memberikan implikasi buruk bagi pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat, karena kenyataan dilapangan menyebutkan bahwa selama ini masyarakat menerima pelayanan yang kurang prima dan terkesan tidak dihargai. Secara logika jika pegawai birokrasi semakin banyak maka semakin gampang pula masyarakat mendapatkan pelayanan tapi hal tersebut tidak terjadi, birokrasi terkesan lambat, tidak efisien, berbelit-belit, dan tidak memiliki standar kepastian kerja yang baik.

Pelayanan yang *pro* terhadap masyarakat akan sulit ditemukan. Birokrasi yang tercipta cenderung untuk melayani para kaum elit dan dirinya sendiri, ketimbang memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Walaupun kinerja birokrasi sudah membaik, tetapi karena adanya struktur yang tambun menyebabkan birokrasi itu menjadi sulit untuk bergerak secara leluasa.

Keempat, tambunnya birokrasi pemerintah kita akan menimbulkan suatu penyakit yang paling ditakuti masyarakat kita saat ini yaitu korupsi. Korupsi yang terjadi disebabkan karena tambunnya birokrasi menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lemah. Tingginya tingkat korupsi pegawai pemerintah membuat

⁸⁸ Dalam artikel Kompas edisi 3 Mei 2012 yang berjudul "Birokrasi Terlampau Gemuk"

Indonesia pada tahun 2011 berada pada peringkat ke-100 dari 183 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang diukur Transparency International.⁸⁹

Dalam era pemerintahan SBY korupsi yang dilakukan oleh pegawai birokrasi tidak hanya terjadi pada pegawai yang sudah lama duduk dalam struktur, tetapi sudah menyentuh pegawai birokrat muda. Kasus yang dapat dijadikan sebagai contoh birokrat muda yang terkait korupsi adalah Gayus Halomon Tambunan yang notabeneanya seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III A tapi sudah memiliki kekayaan mencapai 25 miliar yang sebagian besar didapatkan melalui hasil penggelapan dana pajak masyarakat.

Kasus Gayus yang hanya seorang birokrat muda tetapi sudah mampu melakukan korupsi mempertegas pernyataan bahwa birokrasi menjadi tempat reproduksi koruptor. Para birokrat muda tidak mungkin melakukan praktik korupsi sendiri, apalagi mereka belum memiliki kekuasaan dan belum menjadi pimpinan proyek. Sehingga kemungkinan besar birokrat muda ini hanya dijadikan sebagai alat oleh para atasannya.

Korupsi birokrat muda ini bagaikan bentuk adanya regenerasi korupsi yang tumbuh dalam struktur birokrasi kita. Dengan jumlah pegawai birokrat yang sangat banyak menyebabkan pengawasan internal menjadi lemah, ditambah lagi dengan tetap bercokolnya para senior yang korup, meskipun dilakukan perekrutan birokrat yang profesional praktek korupsi ini akan tetap terjadi. Untuk mengetahui gambaran secara jelas jumlah birokrat (PNS) kita, berikut akan disajikan data yang menggambarkan peningkatan jumlahnya mulai tahun 2007-2011:

Tabel 12. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007-2011⁹⁰

Tahun	Jumlah	Peningkatan
2007	4.067.201	9,18%
2008	4.083.360	0,4%
2009	4.524.205	10,8%
2010	4.598.100	1,63%
2011	4.708.330	26%

Sumber: *Detik Finance*

⁸⁹ Dalam artikel Kompas edisi 9 Maret 2012 yang berjudul “Reformasi Birokrasi: Pemahaman Sempit, Hasil Masih Minim”

⁹⁰ Dalam artikel “Jumlah PNS Membengkak 30% Dalam Delapan Tahun” diunggah melalui laman web <http://finance.detik.com>

Lingkungan birokrasi juga menjadi faktor pendukung yang sangat signifikan dalam melihat fenomena korupsi pada birokrasi tambun. Sistem anggaran yang diterapkan pada setiap lembaga pemerintah memang memiliki celah yang dapat menuntun mereka ke arah tindak korupsi. Jadi kesalahan sistem dirasa memang sudah akut sehingga sejujur-jujurnya seorang birokrat tetap akan korup jika sudah masuk pada sistem

Evektivitas Kinerja Dalam Birokrasi Tambun

Tambunnya birokrasi yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Yudoyono sekarang ini memang memiliki banyak implikasi, dan kebanyakan implikasi yang terjadi adalah implikasi yang mengarah pada hal yang berbau negatif. Birokrasi menjadi semakin lama semakin independen dan berkuasa, dan aturan-aturan yang mengendalikan pelaksanaan kekuasaan dari birokrasi itu tidak terdefiniskan dengan jelas, sehingga birokrasi dapat memberikan ancaman terhadap struktur politik demokrasi dan terhadap para politisi yang menjalankan demokrasi.⁹¹

Birokrasi tambun merupakan suatu hal yang memang menjadi kendala beberapa tahun terakhir ini. Menjadi kendala karena birokrasi tambun cenderung mengarah pada tahap hilangnya produktifitas dalam hal pelayanan publik. Hal ini terjadi akibat adanya kesalahan pada tahap rekrutmen dan manajemen yang lemah. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan menjadi seperti bom waktu yang dapat membusukan birokrasi.

Seperti yang banyak diberitakan sekarang, pemerintah memang mengakui adanya birokrasi yang terlalu tambun dan lamban dalam bekerja. Sehingga kualitas kerja yang dihasilkannya pun memiliki kualitas yang rendah, penilaian ini didasarkan dari adanya sebuah survey yang memberikan adanya gambaran mengenai pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat sekarang ini. 80,7 persen koresponden menyatakan bahwa pemerintah belum berhasil meningkatkan pelayanan yang diberikan aparat birokrat kepada masyarakat.

Walupun menyadari tambunnya birokrasi ini dapat menurunkan efektivitas kinerja, namun belum adanya keseriusan yang diperlihatkan pemerintah dalam menciptakan suatu model birokrasi ramping dan efisien. Padahal masih banyak terdapat lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yang sama seperti Kementrian

⁹¹ Halevy, Eva Etzioni. Ibid hlm. 140

Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan. Dua kementrian seperti ini dapat digabung dan jumlah pegawainya bisa diciutkan.

Pemerintah seakan mengalami sebuah dilema, di satu sisi pemerintah ingin melakukan perampingan birokrasi demi mengejar efisiensi dan efektifitas, di sisi lain pemerintah dihadapkan pada resistensi karena banyak pegawainya yang akan kehilangan posisi dan pendapatan. Karena banyak yang memandang bahwa birokrasi merupakan pertarungan antar kelas, dimana kelas bawah dan kelas atas selalu bertarung untuk mendapatkan kekuasaan di dalam birokrasi.

Model-model birokrasi tradisional yang selama ini diterapkan pada negara kita memang sudah menghambat pembangunan. Hal ini pernah dikemukakan oleh presiden kita sendiri, Presiden Yudoyono mengeluhkan bahwa birokrasi menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan, bahkan hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh Presiden Megawati. Efektivitas akan tercapai jika pejabat pemerintah mengedepankan kemampuan profesi pegawai, bukan menekankan pada adanya hierarki pegawai.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan selama ini hanya berkutat pada reformasi pegawai, dan itu pun hanya sebatas remunerasi. Sedangkan reformasi kelembaga yang memberikan tujuan untuk merampingkan dan meningkatkan efektivitas justru banyak dilupakan. Dan catatan lain yang tidak dapat dipandang sebelah mata adalah tata aturan kepegawaian yang terlalu memberikan kelonggaran kepada pegawai untuk bekerja.

Seperti yang sudah disebutkan diatas tambunnya birokrasi, sebagian besar berdampak pada turunnya tingkat efektifitas dalam pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. karena banyaknya jumlah pegawai bukan menjadi jaminan bahwa masyarakat akan terlayani secara merata. Sebaliknya banyaknya jumlah pegawai ini akan mengaburkan tugas dan fungsi masing-masing di dalam suatu struktur. Apalagi proporsi orang yang duduk di dalam struktur itu tidak tepat.

Catatan Akhir

Melihat banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari adanya Sindrome Parkinson birokrasi di era pemerintahan Presiden Yudoyono, sudah seharusnya reformasi yang selama ini dipromosikan harus konsisten untuk dilakukan. Perubahan

sistem mutlak harus terjadi, di mana sistem tersebut dapat meningkatkan peran publik dalam reformasi birokrasi.

Pengangkatan wakil menteri yang baru-baru ini terjadi menjadi cerminan bahwa Presiden Yudoyono gagal meyakinkan kinerjanya kepada masyarakat, selain itu wakil menteri yang diangkat dianggap hanya sebagai pajangan. Sebagian nasib wakil menteri di sejumlah kementerian lebih mengenaskan. Ada beberapa wakil menteri yang sama sekali tidak mendapatkan staff, bahkan untuk membeli makan saja wakil menteri itu pergi sendiri ke warung.⁹² Belum selesai masalah pengangkatan wakil menteri timbul lagi satgas yang kemunculannya juga tidak jelas sebagian beranggapan bahwa satgas ini muncul hanya sebagai akal-akalan presiden dalam menutupi suatu kasus.

Sejak dilantik agenda reformasi birokrasi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas ini seakan menghilang, dalam penyusunan kabinetpun dapat terlihat tidak ada niat untuk melakukan reformasi birokrasi. Manajemen kepemimpinan yang diperlihatkan oleh Presiden Yudoyono sangat buruk dan mekanisme kontrol yang sangat lemah.

Sebenarnya para birokrat yang duduk di dalam pemerintahan yang jumlahnya mencapai jutaan orang saat ini merupakan orang yang pintar, tapi tidak adanya suatu manajemen pimpinan yang benar menyebabkan orang-orang ini bekerja seperti tanpa jalur. Sehingga walaupun birokrasi tambun tapi memiliki fungsi yang sangat minim. Sekarang bukan saatnya pimpinan hanya berteori melainkan menunjukkannya langsung dengan tindakan.

Selain itu tambunnya birokrasi ini juga diperparah dengan struktur birokrasi tradisional yang masih melekat. Sudah seharusnya pemerintah mampu mengembangkan sistem kepejabatn fungsional dimana lebih mendekatkan kinerja birokrasi pada prinsip-prinsip yang lebih profesional, efektif dan akuntabel*** .

⁹² Dalam majalah Tempo edisi 24-30 Oktober 2011

Daftar Pustaka

Buku:

Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik. LP3ES, Jakarta.

Halevy, Eva Etzioni. 2011. Birokrasi & Demokrasi, Sebuah Dilema Politik. Total Media, Yogyakarta.

Setiono, Budi. 2002. Jaring Birokrasi Tinjauan Dari Aspek Politik Dan Administrasi. PT. Gugus Press, Bekasi.

Koran dan Majalah:

Kompas 3 Mei 2012 yang berjudul “Satgas dan Kerapuhan Pelembagaan”

Kompas edisi 9 Maret 2012 yang berjudul “Reformasi Birokrasi: Pemahaman Sempit, Hasil Masih Minim”

Majalah Tempo edisi 24-30 Oktober 2011